

## Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Pulau Sumatera Tahun 2019 – 2023

Fany Dwi Nofitri

fanynofitri@gmail.com

Rini Elvira

rinielvira@uinbukittinggi.ac.id

### Abstract

*This study aims to test and see whether regional spending with capital expenditure indicators has an influence on human development with the Human Development Index (HDI) indicator on the island of Sumatra in 2019-2023. Secondary data is used with data collection techniques, namely through documentation of publication data sourced from several official websites of government agencies such as the Central Statistics Agency (BPS) for Human Development Index (HDI) data and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for capital expenditure data in all provinces on the island of Sumatra from 2019-2023. The data analysis technique used is simple linear regression. The results obtained show that capital expenditure has a significant negative effect on the Human Development Index (HDI) on the island of Sumatra. Also, the results of the coefficient of determination of capital expenditure have an effect of 0.080 equal to 8 percent on the Human Development Index (HDI). This means that 8 percent of human development (HDI) is influenced by regional expenditure (capital expenditure). While the remaining 92 percent is influenced by other factors not examined.*

**Keywords:** regional expenditure, capital expenditure, human development, HDI

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menguji dan melihat apakah belanja daerah dengan indikator belanja modal memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun 2019-2023. Digunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi dari data-data publikasi yang bersumber dari beberapa situs resmi instansi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk data belanja modal pada semua provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Serta, hasil dari koefisien determinasi belanja modal berpengaruh sebesar 0,080 sama dengan 8 persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya bahwa sebesar 8 persen pembangunan manusia (IPM) dipengaruhi oleh belanja daerah (belanja modal). Sedangkan sisanya, 92 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

**Kata kunci:** belanja daerah, belanja modal, pembangunan manusia, IPM

### PENDAHULUAN

*United Nations Development Programme (UNDP)* berpendapat bahwa pembangunan harus diperuntukkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, pembangunan memiliki arti sebuah mekanisme yang memiliki tujuan dalam membangun dan meningkatkan pilihan-pilihan yang dapat diperoleh manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Definisi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (sdm), tentu akan terbukanya berbagai pilihan dan peluang

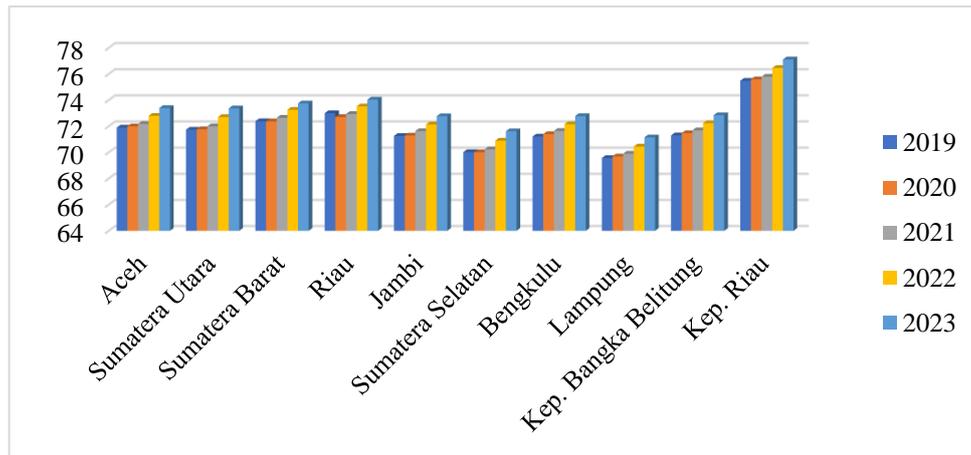
yang memungkinkan masyarakat bebas menentukan bagaimana menjalani hidupnya (Hasan dan Azis 2018, 441). UNDP mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan upaya dalam meningkatkan pilihan-pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan dan hak-hak dasar lainnya. Perluasan pilihan ini didukung oleh peningkatan terhadap akses terhadap sumber daya seperti air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena tujuan pembangunan manusia yaitu untuk menaikkan kualitas hidup individu serta masyarakat secara menyeluruh dengan memperluas pilihan mereka dalam mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (Badan Pusat Statistik 2023, 6).

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara dan daerah untuk menjalankan fungsinya dan mendanai kegiatan yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pengeluaran pemerintah dibelanjakan untuk sektor publik dalam menyediakan barang dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, jaminan sosial, dan sebagainya (Ridwan dan Nawir 2021, 70). Belanja pemerintah meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah (Ridwan dan Nawir 2021, 79).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digolongkan dalam beberapa kelompok yakni, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer (Latif et al. 2019, 17). Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai indikator untuk menjelaskan belanja daerah. Kegiatan dalam menganggarkan dan mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh serta menambahkan asset tetap dan lainnya untuk membrikan manfaat dalam periode waktu yang panjang melebihi satu periode akuntansi atau lebih dari dua belas bulan disebut belanja modal. Asset tetap yang diperoleh dipergunakan dalam menunjang kegiatan operasional pemerintah atau dipergunakan oleh masyarakat (Zamroni, Iqbal, dan Sartika 2023, 6). Asset tetap tersebut dapat berupa fasilitas layanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Menurut UNDP, Ramirez dan Ranis, alokasi pengeluaran pemerintah (belanja daerah) pada investasi barang publik (belanja modal) pada bidang yang menjadi prioritas pembangunan manusia seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan bisa menentukan pencapaian indikator pembangunan manusia. Mekanisme pasar tidak memberikan jaminan dalam menyediakan fasilitas dan barang publik yang merata untuk masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang tinggal di pelosok perdesaan. Oleh sebab itu, perlunya peran pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai fasilitas publik yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat (Hasan dan Azis 2018, 435). Menurut Putranto, belanja modal menjadi salah satu sarana yang dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi suatu daerah yakni dengan peningkatan kesejahteraan serta pelayanan terhadap masyarakat suatu daerah melalui penyediaan fasilitas umum. Penyediaan fasilitas umum yang baik akan memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan fasilitas yang terhubung secara langsung ke paa kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan (Putranto 2020, 6).

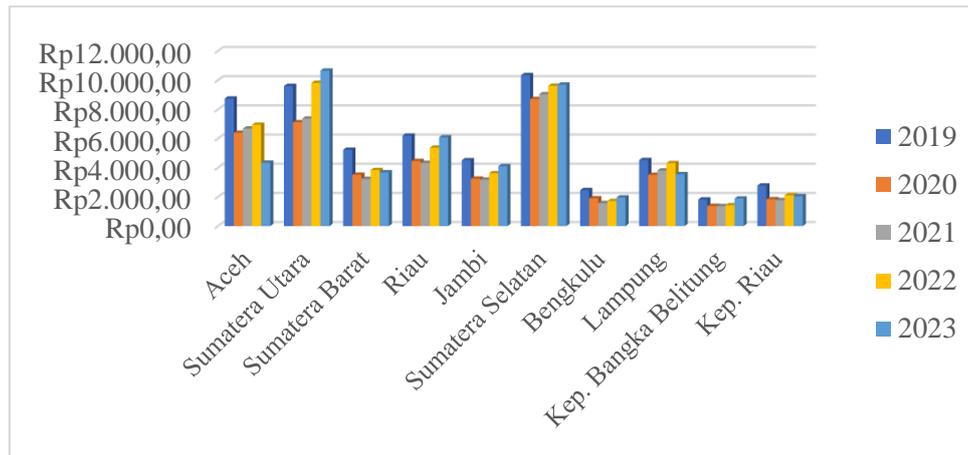
Sebagai pulau terbesar ketiga dan padat penduduk setelah Pulau Jawa di Indonesia, Pulau Sumatera terdiri dari sepuluh provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau. Melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020 – 2023 di Pulau Sumatera sebesar 13,68% dengan jumlah total pada tahun 2023 sebesar 60756,4 ribu penduduk (Badan Pusat Statistik Indonesia 2024, 120). Jumlah penduduk yang relatif besar ini dapat menjadi potensi atau masalah jika tidak dibarengi dengan kualitas yang baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni ukuran dalam menilai kinerja atau capaian pembangunan manusia di suatu daerah.



**Gambar 1**  
**Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi – Provinsi**  
**di Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2023.**

*Sumber : diolah, 2024*

Gambar 1 menunjukkan bahwa IPM setiap provinsi di Pulau Sumatera cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Provinsi Riau menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan IPM pada tahun 2019 hingga 2020, yaitu mulai dari 73,00 turun menjadi 72,26. Dari data yang ada, provinsi dengan nilai IPM tertinggi yakni Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki nilai IPM sebesar 77,11 pada tahun 2023. Sebaliknya, provinsi dengan nilai IPM terendah adalah Provinsi Lampung yang memiliki nilai IPM sebesar 71,15 pada tahun 2023. Tingkat nilai IPM dapat diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni: (1) rendah (IPM kurang dari 60), (2) sedang (IPM antara 60 hingga 70), (3) tinggi (IPM antara 70 hingga 80), (4) sangat tinggi (IPM 80 ke atas) (Beik and Arsyianti 2019, 147–48). Berdasarkan pengklasifikasian nilai IPM dapat disimpulkan bahwa nilai IPM setiap provinsi di Pulau Sumatera tergolong dalam IPM yang status tinggi (IPM antara 70 hingga 80).



**Gambar 2**  
**Grafik Belanja Modal (Miliar Rupiah) Pemerintah Daerah**  
**Provinsi – Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2023.**

*Sumber : diolah, 2024*

Gambar 2 memperlihatkan bahwa realisasi belanja modal setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi setiap tahun selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah terbesar terdapat pada Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp 10.659,68 M. Sedangkan realisasi belanja modal pemerintah daerah terendah terdapat pada Provinsi Bangka Belitung dengan realisasi belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp 1.892,07 M.

Berdasarkan gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa IPM mengalami peningkatan yang tidak sejalan dengan naik turunnya realisasi belanja modal dari tahun 2019 – 2023. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi belanja modal dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia. Dengan demikian, permasalahan yang ada ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan teori yang ada, dikatakan oleh Chakraborty bahwa alokasi belanja modal dalam menyediakan fasilitas layanan publik dapat mendorong peningkatan indikator pembangunan manusia (Hasan and Azis 2018, 435).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Moh. Khusaini memperlihatkan bahwa belanja modal pada tahun 2017 hingga 2021 memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap IPM di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua. Dengan arti setiap belanja modal

mengalami kenaikan demikian Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan (Nanda and Khusaini 2024, 427). Sedangkan, menurut Handayani memperlihatkan bahwa belanja modal terhadap IPM memiliki pengaruh signifikan positif di 35 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Artinya setiap belanja modal mengalami peningkatan maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami peningkatan (Handayani and Woyanti 2021, 25). Terakhir menurut Hamdi dkk, alokasi anggaran belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap laju indeks pembangunan manusia pada Kota Banda Aceh periode 2010 hingga 2022. Artinya kenaikan atau pun penurunan belanja modal tidak mempengaruhi laju Indeks Pembangunan Manusia (Hamid and Yusuf 2023, 676).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh belanja daerah melalui indikator belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan manusia di Pulau Sumatera tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini diinginkan bisa menyumbangkan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera, akademisi, peneliti dan masyarakat yang membaca dalam meningkatkan potensi dan kinerja pengeluaran pemerintah/belanja daerah pada provinsi di Pulau Sumatera.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pembangunan Manusia**

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia adalah sebagai upaya perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan dan hak-hak dasar lainnya. Perluasan pilihan ini didukung oleh peningkatan terhadap akses terhadap sumber daya seperti air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena tujuan pembangunan manusia yaitu untuk menaikkan kualitas hidup individu serta masyarakat secara menyeluruh dengan memperluas pilihan mereka dalam mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (Badan Pusat Statistik 2023, 6).

*United Nations Development Programme* (UNDP) pada 1990 pertama kali memperkenalkan konsep pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah dalam hal

pembangunan manusia yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Sedangkan, Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator gabungan yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kinerja pembangunan manusia suatu negara (wilayah) (Hasan and Azis 2018, 444). Oleh karena itu, bisa dirangkum bahwa IPM yaitu sebagai alat ukur/indikator yang dipakai dalam mengukur tingkat pencapaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara. Konsep pengukuran pembangunan manusia ini menggabungkan beberapa dimensi diantaranya yakni dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pendidikan serta dimensi standar hidup layak (Beik and Arsyianti 2019, 147; Nurcholis, Kartono, and Aisyah 2016, 1.11).

### **Belanja Daerah**

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara dan daerah untuk menjalankan fungsinya dan mendanai kegiatan yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pengeluaran pemerintah dibelanjakan untuk sektor publik dalam menyediakan barang dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, jaminan sosial, dan sebagainya (Ridwan dan Nawir 2021, 70). Belanja pemerintah meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah (Ridwan dan Nawir 2021, 79).

Belanja daerah memuat seluruh pengeluaran pada Rekening Kas Umum Daerah dan mengurangi ekuitas dana lancar (selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek) Hal ini adalah kewajiban daerah pada satu periode anggaran dimana daerah tidak akan menerima pengembalian (Dilliana and Herdi 2022, 22). Menurut Bastian, belanja daerah yaitu beban belanja daerah yang dianggarkan dan dialokasikan selaku adil dan merata untuk kepentingan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, terutama dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum (Dilliana and Herdi 2022, 20). Belanja daerah dipergunakan dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menurut undang-undang menjadi tanggung jawab atau wewenang pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digolongkan dalam kelompok sebagai berikut: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer (Latif et al. 2019, 17). Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai indikator untuk menjelaskan belanja daerah. Kegiatan dalam menganggarkan dan mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh serta menambahkan asset tetap dan lainnya untuk membrikan manfaat dalam periode waktu yang panjang melebihi satu periode akuntansi atau lebih dari dua belas bulan disebut belanja modal. Asset tetap yang diperoleh dipergunakan dalam menunjang kegiatan operasional pemerintah atau dipergunakan oleh masyarakat (Zamroni, Iqbal, dan Sartika 2023, 6). Asset tetap tersebut dapat berupa fasilitas layanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

### **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia**

Menurut UNDP, Ramirez dan Ranis, alokasi pengeluaran pemerintah (belanja daerah) pada investasi barang publik (belanja modal) pada bidang yang menjadi prioritas pembangunan manusia seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan bisa menentukan pencapaian indikator pembangunan manusia. Mekanisme pasar tidak memberikan jaminan dalam menyediakan fasilitas dan barang publik yang merata untuk masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang tinggal di pelosok perdesaan. Oleh sebab itu, perlunya peran pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai fasilitas publik yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat (Hasan dan Azis 2018:435). Chakraborty juga mengatakan, bahwa indikator pembangunan manusia dapat ditingkatkan melalui penyediaan berbagai fasilitas publik oleh pemerintah daerah (Hasan dan Azis 2018:435).

### **Hipotesis**

$H_0$ : Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia pada provinsi – provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2023.

$H_a$ : Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia pada provinsi – provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2023.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan mempergunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan bentuk kausalitas atau hubungan sebab akibat. Metode ini dipergunakan dengan tujuan dalam mengetahui bagaimana pengaruh antara variable bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini (Sahir 2021, 15–16). Data sekunder digunakan sebagai data yang hendak di uji dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi dari data-data publikasi yang bersumber dari beberapa situs resmi instansi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) untuk data belanja modal pada semua provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2019-2023. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dalam aplikasi SPSS versi 23 dimulai dengan melakukan uji prasyarat analisis data dalam menjamin bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu benar serta siap untuk diuji hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	df	Sig.
IPM	,123	50	,057
Belanja Modal	,172	50	,001
a. Lilliefors Significance Correction			

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**  
*Sumber: diolah, 2024*

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan data IPM mempunyai distribusi yang normal, dikarenakan nilai sig. 0,057 yang melebihi batas signifikansi 0,05. Sedangkan data penelitian belanja modal tidak memiliki distribusi yang normal, karena nilai sig. 0,001 kurang dari nilai batas signifikansi 0,05. Dalam mengatasi ketidaknormalan data belanja modal bisa dilakukan melalui pengubahan data dalam bentuk lainnya seperti bentuk Logaritma Natural (LN). Singgih Santoso berkata bahwa sebuah variabel yang memiliki sebaran data tidak normal bisa digunakan penanganan melalui

transformasi data dalam bentuk LN atau bentuk lainnya (Santoso 2017, 46). Selanjutnya, data yang telah dilakukan transformasi dalam bentuk LN dan dilakukan uji normalitas bisa diketahui hasilnya pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data dalam Bentuk Logaritma Natural (LN)**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	df	Sig.
IPM	,123	50	,057
Ln Belanja Modal	,105	50	,200*

\*. This is a lower bound of the true significance.  
a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: diolah, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa belanja modal memiliki nilai sig. 0,200 yang artinya melebihi dari batas signifikansi 0,05, dengan artian bahwa belanja modal berdistribusi normal. Dengan begitu, bisa dirangkum bahwa seluruh data yang ada berdistribusi secara normal serta bisa digunakan untuk uji selanjutnya.

### Uji Homogenitas

**Tabel 3**  
**Tests of Homogeneity of Variances**

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
IPM	Based on Mean	1,652	2	47	,203
	Based on Median	1,730	2	47	,188
	Based on Median and with adjusted df	1,730	2	39,159	,191
	Based on trimmed mean	1,679	2	47	,198

Sumber: diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan hasil dari uji homogenitas yang menggunakan uji *levene* bisa ditunjukkan bahwa nilai sig. dari IPM sebesar 0,203 > 0,05, maka artinya bahwa data IPM bersifat homogen atau bervariasi sama.

### Uji Linearitas

**Tabel 4**  
**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
IPM * Ln Belanja Modal	Between Groups	(Combine d)	125,574	45	2,791	1,100	,533
		Linearity	10,915	1	10,915	4,302	,107

	Deviation from Linearity	114,659	44	2,606	1,027	,568
	Within Groups	10,149	4	2,537		
	Total	135,723	49			

Sumber: diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji linearitas memperlihatkan nilai sig. dari *deviation from linearity* sebesar  $0,568 > 0,05$ . Dengan demikian, hubungan antara belanja daerah (belanja modal) dan pembangunan manusia (IPM) adalah linear.

### Regresi Linear Sederhana

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	78,649	3,094		25,416	,000
	Ln Belanja Modal	-,763	,372	-,284	-2,049	,046

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan koefisien dari variabel penelitian yang dapat dirangkai menjadi persamaan regresi linear sebagai berikut ini:

$$\text{Pembangunan Manusia} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Belanja Daerah} + e$$

$$Y = 78,649 - 0,763X + e$$

- 1) Nilai konstanta ( $\beta_0$ ) sebesar 78,649 yang memiliki arti apabila belanja modal (X) dalam keadaan konstanta atau 0, maka IPM (Y) nilainya sebesar konstanta yaitu 78,649 persen. Dengan arti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak akan mencapai nol dan mempunyai nilai minimum diatas nol atau lebih dari nol. Hal ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang secara intrinsik memengaruhi variabel dependen tersebut.
- 2) Nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) belanja modal sebesar 0,763 atau 76,3 persen dengan arah koefisien negatif, artinya bahwa setiap belanja modal alami peningkatan satu persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan

sebesar 76,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai belanja modal maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan semakin rendah.

### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	25,416	,000
	Ln Belanja Modal	-2,049	,046
a. Dependent Variable: IPM			

Sumber: diolah, 2024

Tabel 6 menunjukkan hasil uji t bisa diketahui nilai signifikansi (sig.) untuk variabel belanja daerah (belanja modal) adalah 0,046 dan nilai t hitung sebesar  $-2,049 = 2,049$  maka  $2,049 > 1,676$ . Nilai signifikansi sebesar  $0,046 < 0,05$  dan nilai t hitung  $-2,049 = 2,049 > 1,676$  menunjukkan belanja daerah terhadap pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  $H_a$  diterima karena belanja daerah (belanja modal) terhadap pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2023.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,284 <sup>a</sup>	,080	,061	1,61250
a. Predictors: (Constant), Ln Belanja Modal				

Sumber: diolah, 2024

Tabel 7 menunjukkan nilai  $R^2$  yakni 0,080 atau 8 persen. Dengan arti bahwa sebesar 8 persen pembangunan manusia (IPM) dipengaruhi oleh belanja daerah (belanja modal). Sedangkan sisanya, 92 persen dipengaruhi dari beberapa faktor selain yang diteliti, seperti belanja daerah dengan indikator selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan belanja rumah tangga.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan dengan aplikasi SPSS, melalui uji t diperoleh belanja daerah dengan indikator belanja modal terhadap pembangunan manusia dengan indikator IPM dengan nilai signifikansi 0,046. Hasil signifikansi  $0,046 < 0,05$  yang artinya belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian, bisa disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dikarenakan belanja daerah dengan indikator belanja modal terhadap IPM sebagai indikator dari pembangunan manusia IPM memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang negatif di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2023.

Dilihat dari hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear sederhana didapati koefisien regresi belanja modal sebesar -0,763 atau 76,3 persen yang menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah negatif. Dengan artian lain maka setiap kenaikan belanja modal sebesar satu miliar atau satu persen akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,763 miliar atau 76,3 persen. Arah hubungan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang negatif disebabkan oleh ketika anggaran belanja modal yang dialokasikan tiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi (naik turun) berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahun.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini selurus beserta penelitian yang dilakukan oleh Pandu Nandi Putranto bahwa belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan yang negatif di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015 – 2018. Penelitian ini menyebutkan hal itu disebabkan oleh keseluruhan jumlah belanja modal yang fluktuatif tidak selurus beserta nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung naik pada kabupaten/kota Provinsi Papua. Lebih jauh, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan dalam berinvestasi dalam periode waktu yang panjang dengan manfaat yang tidak dapat dirasakan dalam periode waktu yang lebih pendek atau singkat. Oleh sebab

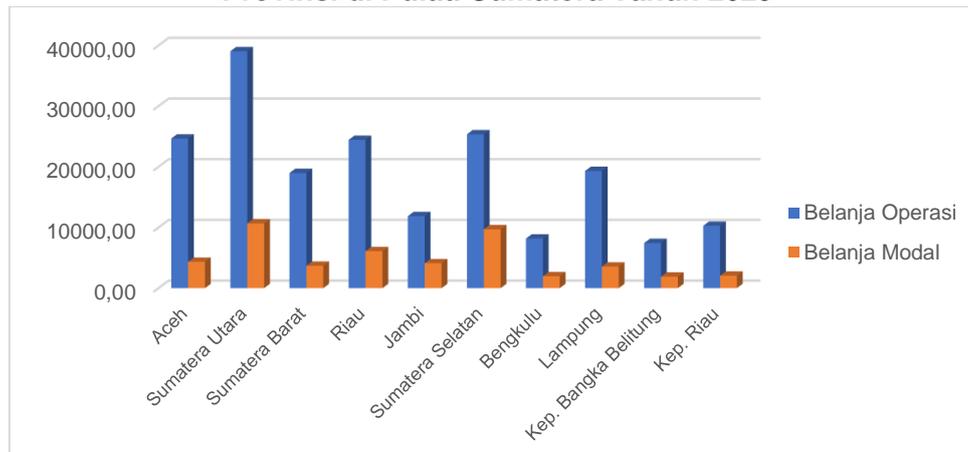
itu, diperlukan sebuah penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang dalam mengetahui manfaat belanja modal (Putranto 2020, 11).

Dalam penelitian Mahirsyah Pradana bahwa alokasi belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan yang negatif di kabupaten/kota Indonesia tahun 2011 – 2015. Menurut peneliti, keadaan ini disebabkan oleh belanja modal yang diharapkan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, contohnya pembangunan gedung sekolah yang selesai menjelang akhir periode tahun anggaran sedangkan penerimaan siswa baru dilakukan awal tahun ajaran. Alhasil, belanja modal yang telah dialokasikan dalam membangun gedung sekolah pada periode tahun anggaran tersebut baru bisa dirasakan manfaatnya pada periode tahun anggaran berikutnya saat penerimaan siswa baru. Hal ini yang menyebabkan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang negatif (Pradana 2018).

Dalam penelitian Nanda dan Moh. Khusaini bahwa belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan yang negatif di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2017 – 2021. Alokasi belanja daerah terutama ketidakefektifan alokasi belanja modal dapat memberikan dampak pada pencapaian tingkat kualitas pembangunan manusia. Karena tidak terlepas dari peran belanja modal dalam menyediakan berbagai program pelayanan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Artinya semakin besar alokasi belanja modal, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam mencapai kesejahteraan (Nanda and Khusaini 2024, 434).

Berkaitan dengan fluktuasi belanja modal, rata – rata realisasi belanja daerah setiap provinsi di Pulau Sumatera masih di dominasi oleh belanja operasi, sedangkan belanja modal belum menjadi prioritas pemerintah daerah, dapat dilihat pada gambar 4. Hal ini yang akan menjadi penghambat bagi belanja modal dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pembangunan manusia dengan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

**Gambar 4**  
**Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal**  
**Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023**



Sumber: diolah, 2024

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan penelitian terdahulu lainnya, antara belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki hubungan negatif disebabkan karena belanja modal belum menjadi prioritas pemerintah daerah pada peningkatan pembangunan manusia di suatu daerah serta manfaat belanja modal merupakan manfaat yang dapat dirasakan pada jangka waktu yang panjang sehingga belum bisa dirasakan dalam jangka waktu yang singkat. Untuk itu, untuk mengoptimalkan belanja modal dalam mendorong pembangunan manusia diperlukannya peran pemerintah daerah dalam menganggarkan dan mengalokasikan belanja modal yang sebanding dengan yang dibutuhkan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan.

Menurut UNDP, Ramirez dan Ranis, alokasi pengeluaran pemerintah (belanja daerah) pada investasi barang publik (belanja modal) pada bidang yang menjadi prioritas pembangunan manusia seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan bisa menentukan pencapaian indikator pembangunan manusia. Mekanisme pasar tidak memberikan jaminan dalam menyediakan fasilitas dan barang publik yang merata untuk masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang tinggal di pelosok perdesaan. Oleh sebab itu, perlunya peran pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai fasilitas publik yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat (Hasan dan Azis 2018, 435). Selain itu, Chakraborty juga

mengatakan hal yang sejalan bahwa alokasi belanja modal dalam menyediakan fasilitas layanan publik dapat mendorong peningkatan indikator pembangunan manusia (Hasan and Azis 2018, 435).

Dengan demikian, alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan manusia harus lebih dipertimbangkan dengan manfaat yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hasil dari diperoleh dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja modal yang fluktuatif dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Maka dari itu, perlunya perhatian pemerintah dalam pengalokasian belanja modal yang optimal untuk menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

### **SIMPULAN**

Belanja daerah (X) dengan indikator belanja modal terhadap pembangunan manusia (Y) dengan indikator IPM memiliki pengaruh dengan hubungan yang negatif setiap provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2023. Karena dapat dilihat dari hasil uji t yang memperlihatkan bahwa nilai signifikansi (sig.) adalah 0,046 dan nilai t hitung adalah - 2,049. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai signifikansi (sig.) (0,046) < alpha ( $\alpha$ ) (0,05) serta nilai t hitung memperlihatkan arah hubungan yang negatif artinya terdapat pengaruh negatif antara belanja daerah (belanja modal) terhadap pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan teori oleh Chakraborty, pengeluaran pemerintah untuk penyediaan bermacam fasilitas publik dapat meningkatkan indikator pembangunan manusia, hal ini tidak sejalan karena antara belanja modal dan IPM memiliki arah hubungan yang negatif. Belanja modal yang belum optimal dan fluktuatif dalam alokasi belanja pemerintah daerah, dapat berimplikasi menjadi penghambat bagi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui penyediaan fasilitas berbagai pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan).

Besarnya pengaruh belanja daerah dengan indikator belanja modal terhadap pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat

dari hasil koefisien determinasi dengan uji R Square, yaitu belanja daerah dengan indikator belanja modal berpengaruh sebesar 0,080 sama dengan 8 persen terhadap pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya bahwa sebesar 8 persen pembangunan manusia (IPM) dipengaruhi oleh belanja daerah (belanja modal). Sebaliknya sisanya, 92 persen dipengaruhi dari beberapa faktor selain yang diteliti, seperti belanja daerah dengan indikator selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan belanja rumah tangga yang terdapat pada landasan teori.

Sebuah penelitian dapat memberikan sebuah arti apabila dapat menyumbangkan kontribusi atau manfaat untuk pembaca ataupun penelitian berikutnya. Beberapa saran yang bisa dibagikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk memperluas fokus penelitian antara lain: Pemerintah sebagai pihak yang menciptakan kebijakan yang berdampak pada masyarakat didaerahnya perlu menciptakan kebijakan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terutama dalam kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah. Alokasi belanja daerah yang optimal diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta, terhadap pembaca maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dan berniat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya tentang penelitian ini, diharapkan memperbanyak variabel penelitian serta menyempurnakan segala kekurangan pada penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. 2019. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Dilliana, Siktania Maria, and Henrikus Herdi. 2022. *Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Hamid, A, and Zulfan Yusuf. 2023. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Banda Aceh." *Jurnal EMT KITA* 7(3): 676–83.
- Handayani, Siti, and Nenik Woyanti. 2021. "Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, Dan Belanja Modal Terhadap IPM DI 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-

- 2019." *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 4(2): 17–26.
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Prespektif Ekonomi Lokal*. Edisi 2. Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.
- Latif, Arsan et al. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Nanda, Rizky, and Moh Khusaini. 2024. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating." *Journal of Development Economic and Social Studies* 3(2). <https://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.8>.
- Nurcholis, Hanif, Drajat Tri Kartono, and Siti Aisyah. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pradana, Mahirsyah. 2018. "Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Develop* 2(1).
- Putranto, Pandu Nandi. 2020. "Analisis Pengaruh Variabel Belanja Modal, Pengeluaran Konsumsi Bukan Pangan, Dan PDRB Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua." <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183248>.
- Ridwan, and Ihsan Suciawan Nawir. 2021. *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosalina, Linda, Rahmi Oktarina, Rahmiati, and Indra Saputra. 2023. *Buku Ajar Statistika*. Padang: CV. Muharika Rumah Ilmiah.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metode Penelitian*. Bantul: KBM Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2017. *Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.
- Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, and Mustofa. 2021. *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jember: Mandala Press.
- Zamroni, Achmad, Muhammad Iqbal, and Sartika. 2023. *Panduan Perencanaan Dan Penganggaran: Seri 4 Klasifikasi Akun Pendapatan & Jenis Belanja*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.